

TERUTAMA BAGI SISWA KELAS AKHIR

Pemkot Izinkan PTM Secara Selektif

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya memberikan izin bagi sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara selektif. Terutama bagi siswa kelas akhir dengan mempertimbangkan syarat kesehatan.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menyebut siswa kelas akhir yang diperkenankan menjalani PTM ialah kelas VI dan IX karena hendak mendekati kelulusan. "Kita berikan izin kepada sekolah-sekolah jika akan menggelar tatap muka. Tapi harus selektif betul," terangnya, Selasa (15/3).

Salah satu pertimbangan diperbolehkannya PTM, khususnya bagi siswa kelas akhir tersebut tidak hanya karena mendekati kelulusan melainkan juga kasus Covid-19 sudah mengalami tren penurunan. Dalam dua pekan terakhir pertumbuhan kasus harian sudah mulai terjadi penurunan. Sedangkan dalam sepekan terakhir temuan kasus baru berada di bawah 100 kasus dan angka kesembuhan semakin banyak.

Heroe menambahkan, dirinya sudah

meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya untuk melakukan seleksi terhadap siswa yang bisa mengikuti PTM di sekolah. Meski demikian, sekolah tetap wajib mengedepankan protokol kesehatan secara ketat. "Sebagian sekolah sudah ada yang mulai PTM. Tapi kapasitasnya tetap 50 persen. Syaratnya orangtua dan anak sudah sesuai dengan syarat kesehatan," tandasnya.

Kepala Disdikpora Kota Yogya Budi Santoso Asrori, menambahkan pelaksanaan PTM secara selektif tersebut juga atas masukan dari masyarakat. Selama ini siswa sudah cukup lama menjalani pembelajaran daring dengan hasil yang kurang optimal jika dibandingkan dengan target kurikulum.

Sementara syarat kesehatan yang menjadi pertimbangan ialah status

vaksinasi anak didik dan orangtua. Saat ini capaian vaksinasi siswa di Kota Yogya sudah mencapai 98 persen dan tenaga pendidiknya mencapai 97 persen. "Kalau dari capaian sudah sangat tinggi hingga dosis kedua. Siswa yang akan mengikuti PTM pun harus kondisi sehat," jelasnya.

Selain itu, Kota Yogya juga sudah memiliki pengalaman PTM dengan kapasitas 100 persen sejak Januari dengan kondisi yang aman. Kendati sempat terjadi lonjakan kasus dengan varian Omicron namun siswa yang terpapar kondisinya tanpa gejala. Jika bergejala statusnya pun ringan serta tidak sampai menjalani perawatan di rumah sakit.

Kendati demikian, PTM di sekolah tetap diberikan keleluasaan. Siswa yang menghendaki pembelajaran secara daring tetap diakomodir melalui hibrid. "Intinya kita bolehkan sekolah menggelar PTM namun tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap melayani masyarakat yang tidak mengikuti PTM," katanya. (Dhi)-f

CEGAH ADANYA PENYALAHGUNAAN

Kejati DIY Beri Pelayanan Hukum Sampai Kalurahan

YOGYA (KR) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY akan memberikan pelayanan hukum sampai kalurahan-kalurahan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran di tingkat kalurahan.

Kajati DIY Katarina Endang Sarwestri SH MH didampingi Wakajati DIY Dr Rudi Margono SH MHum mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya Tim Kejati DIY yang terdiri dari Datun dan Intelijen memberikan pelayanan hukum sampai tingkat kalurahan.

"Kami ingin memberikan manfaat bagi masyarakat. Program yang telah kami lakukan dengan cara memberikan konsultasi dan sosialisasi hukum ke kalurahan," katanya dalam acara *coffee morning* dengan media, Selasa (15/3).

Menurutnya, alasan pelayanan hukum ke



KR-Saifulah Nur Ichwan
Katarina Endang Sarwestri SH MH

kalurahan karena sekarang ini kalurahan mengelola anggaran besar dari pemerintah. Dengan adanya pemahaman hukum, harapan penyalahgunaan atau korupsi dapat dicegah.

"Jadi kami itu tidak hanya melakukan penindakan. Tapi juga melakukan pencegahan. Dengan adanya konsultasi hukum, penyalahgunaan wewenang atau korupsi bisa diantisipasi," tegas Kajati.

Di samping itu, mantan Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan RI ini juga akan membentuk Satgas Sembako. Keberadaan satgas tersebut untuk menjamin dan menjaga ketersediaan pangan di wilayah Yogyakarta. "Satgas Sembako ini terdiri Intelijen dan Datun Kejati DIY. Nanti bersama dengan instansi terkait, akan memantau ketersediaan pangan di wilayah Yogyakarta," tuturnya. (Sni)-f

STATUS PPKM MASIH LEVEL 4

KTT G20 Tetap Diadakan di DIY

YOGYA (KR) - Pemerintah pusat kembali menetapkan kebijakan PPKM level 4 di DIY dan kabupaten/kota yang mulai berlaku pada Selasa (15/3). Keputusan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 16 Tahun 2022 tentang PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa-Bali. Namun PPKM level 4 tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan KTT G20 di DIY yang akan dimulai hari ini, Rabu (16/3).

Pemda DIY siap mendukung penuh kegiatan KTT G20 dengan Prokes ketat.

"Pelaksanaan KTT G20 akan tetap dilaksanakan meski DIY berstatus PPKM level 4. Karena pemerintah sudah memberikan izin untuk pelaksanaan G20 di DIY. Selain itu panitia sudah melakukan antisipasi dengan sistem bubble. Dengan begitu disetiap kegiatan peserta akan dilakukan swab terus. Mereka kita batasi aktivitasnya supaya tidak kemana-mana dulu pada saat acara sedang berlangsung," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di Yogyakarta, Selasa (15/3).

Dungkapkan, Pemda DIY juga sudah menyediakan tempat isolasi khusus bagi dele-

gasi G20 selama berkegiatan di DIY. Tempat isolasi ini disiapkan di hotel yang sebelumnya sudah menyediakan layanan isolasi bagi pasien Covid-19, termasuk berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan penanganan Covid-19.

"Seperti dengan kesepakatan setiap hari akan dilakukan antigen untuk memastikan semua yang hadir dalam pertemuan itu dalam keadaan sehat dan tidak terpapar Covid-19," ujar Baskara Aji.

Sementara itu Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, Agus Priyono mengungkapkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan penyelenggara di tingkat nasional. Termasuk koordinasi dengan berbagai pihak lainnya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait dengan kesehatan para delegasi saat datang ke DIY nantinya.

Hal ini dilakukan sebagai antisipasi dan memastikan kondisi kesehatan seluruh delegasi yang mengikuti G20 di DIY. Pasalnya, saat ini penyebaran Covid-19 masih terus terjadi, meskipun di DIY beberapa hari terakhir penambahan kasus terus menunjukkan penurunan. (Ria)-f

10 KUBE Peroleh Bantuan Modal

YOGYA (KR) - Sepuluh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Yogya lolos untuk memperoleh bantuan modal dari Pemda DIY. Selama pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung dua tahun lebih, produktivitas KUBE juga tak luput dari terpaan.

"Kesepuluh KUBE tersebut telah diseleksi berdasarkan administrasi kegiatan KUBE, keutuhan anggota atau kelembagaan dan perkembangan modal usahanya," jelas Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Yogya Tri Oktavia Marjani, Senin (14/3).

KUBE yang memperoleh bantuan modal usaha tersebut tersebar di berbagai wilayah. Di antaranya di Gunungketur, Prawirodirjan, Suryodiningrat, Purwokinan, Gedongkiwo, Danurejan, Jatis serta Purbayan.

Tri Oktavia Marjani menyebut, jumlah bantuan mencapai Rp 23 juta untuk setiap KUBE. Pihaknya juga telah memberikan bimbingan teknis bagi para calon penerima bantuan. "Dana bantuan modal tersebut digunakan untuk pembelian barang dan alat yang menunjang usaha masing-masing anggota KUBE sesuai dengan kebutuhannya yang telah disusun dalam rencana pengembangan usahanya," urainya.

Bimbingan teknis yang diberikan Dinsosakertrans Kota Yogya tidak semata menjadi prasyarat untuk memperoleh bantuan melainkan sekaligus pengembangan kapasitas. Pihaknya pun berpesan agar ilmu yang diterima bisa diterapkan dalam berwirausaha dan bantuan yang diterima bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Terutama guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. "Hemat, cermat dan disiplin dalam penggunaan keuangan merupakan salah satu kunci sukses usaha," tandasnya.

Sementara Ketua KUBE Sejahtera XII BNKT 016 Tegal Lempuyangan Danurejan, Supeni, mengutarakan rasa senangnya bisa turut serta menimba ilmu melalui bimbingan teknis. Dirinya juga berterima kasih pada pemerintah yang telah memperhatikan dan membantu keberlangsungan usaha KUBE. (Dhi)-f

Golkar DIY Gelar Semaan Alquran



KR-Devid Permama
Semaan dan khataman quran di aula DPD Partai Golkar DIY.

YOGYA (KR) - DPD Partai Golkar DIY menyelenggarakan semaan dan khataman Alquran 30 juz di aula Kantor DPD Partai Golkar DIY, Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta, Selasa (15/3). Kegiatan diikuti segenap pengurus dan kader Partai Golkar DIY secara terbatas bersama 9 penghafal quran (hafidz) yang tergabung dalam Satkar Ulama DIY.

Ketua panitia sekaligus Ketua Satkar Ulama DPD Partai Golkar DIY, Agus Subagyo menuturkan, penyelenggaraan semaan dan khataman quran diinisiasi oleh Ketua DPD Partai Golkar DIY Drs HM Gandung Pardiman. Ini dalam rangka bermunajat dan berdoa kepada Allah SWT agar cita-cita memenangkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024, menjadi terwujud.

"Semoga doa dari Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU) KH Yahya Cholil Staquf yang mendoakan Ketum Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian, naik kelas menjadi atasannya menteri atau Presiden, dikabulkan oleh Allah SWT," kata Agus kepada KR di sela kegiatan.

Menurut Agus, kegiatan semaan quran dimulai pukul 07.30-15.00 WIB kemudian dilanjutkan doa khotmil quran. Setelah kegiatan semaan dan khataman quran ini, keesokan harinya, Rabu (16/3), DPD Partai Golkar DIY mengadakan acara salawatan bertajuk 'Golkar DIY Bersalawat' di Graha GPC, Karang Tengah, Imogiri Bantul. (Dev)-f

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

KUALITAS PENDIDIKAN DIPERTARUHKAN

Dilema Pembelajaran Sekolah Selama Pandemi

YOGYA (KR) - Setelah beberapa saat menggulirkan pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh, Kota Yogya terpaksa harus kembali memberlakukan pembelajaran daring atau jarak jauh. Hal ini seiring kebijakan PPKM level 4 di wilayah DIY. Kondisi tersebut menjadikan dilema tersendiri karena berkaitan dengan kualitas pendidikan yang dipertaruhkan.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Yogyakarta Yogo Prasetyo Pri Hutomo, mengungkapkan selama proses pembelajaran jarak jauh pada tahun lalu berdampak pada menurunnya mutu kualitas pendidikan yang diterima oleh anak didik.

"Ini menjadi dilema karena di saat pembelajaran jarak jauh kan banyak yang memberikan les tambahan bagi anaknya. Dengan adanya kerumunan saat les itu sama aja dengan PTM. Tapi sekolah juga dilema untuk menyelenggarakan PTM karena berkaitan PPKM level 4," urainya.

Di samping itu selama pembelajaran jarak jauh tidak sedikit tugas-tugas yang diberikan oleh pihak sekolah. Tugas tersebut bahkan layaknya seperti ujian namun dikerjakan di rumah. Bahkan banyak pula tugas yang

Yogo Prasetyo Pri Hutomo
Fraksi Partai Golkar



KR-Istimewa

akhirnya dikerjakan oleh orangtua atau wali siswa.

"Kalau seperti itu kan yang belajar anaknya atau orangtuanya. Hal-hal seperti ini harus banyak dicermati pemerintah berkaitan kualitas anak didik. Dengan ujian di rumah, pengerjaan tugas-tugas yang mengerjakan orangtua, bagaimana nanti kualitas anak. Belum lagi jika ada orangtua yang tidak bisa memberikan les tambahan," imbuh Tomo, sapaan akrabnya.

Oleh karena itu Tomo berharap ada solusi terkait pembelajaran sekolah selama pandemi. Apalagi meski di DIY diterapkan PPKM level 4 namun kegiatan di kampung-kampung juga sudah berangsur normal atau banyak kerumunan. Pemerintah pusat juga mulai memberikan kelonggaran bagi aktivitas publik baik yang menyangkut transportasi maupun kegiatan sosial.

"Apalagi ini mendekati kenaikan kelas juga kelulusan sekolah. Ketika hasil ujian atau tes yang didapatkan di kala ada wali siswa atau orangtua yang mengerjakan, bagaimana nanti kualitas anak didik itu?. Aspek kesehatan harus tetap diutamakan namun kualitas pendidikan jangan sampai kembali menurun," harapnya. (Dhi)-f

BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KPKNL YOGYAKARTA
PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Nomer 4 Tahun 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet (*Closed Bidding*) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta terhadap agunan debitur atas nama:

SRI NURYANTI
1) Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 15314/Maguwoharjo seluas 364 m2 atas nama KARJIAH terletak di Desa/Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nilai Limit Rp1.545.000.000,- Jaminan Penawaran Lelang Rp465.000.000,-

Pelaksanaan Lelang :
Hari/Tanggal : Rabu / 30 Maret 2022
Waktu Pelaksanaan : 14.00 WIB
Batas Akhir Penawaran : Rabu, 30 Maret 2022 Jam 14.00 Waktu Server (Sesuai WIB)
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
Tempat Lelang : KPKNL YOGYAKARTA
Jalan Kusumanegara No.11 Yogyakarta

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang (*Closed Bidding*) yang di akses pada sistem domain www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
- Pendaftaran calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun Badan Usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan Akun pada Aplikasi Lelang melalui Internet pada alamat domain yang disebut angka 1 dengan merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP, NPWP (ekstensi File .jpg atau .png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
- Uang jaminan lelang
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Jumlah atas nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan lelang yang **disyaratkan** penjual dalam pengumuman lelang dan disetor sekaligus (bukan cicilan).
 - Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif di terima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, nomor Virtual Account (VA) akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid / sah.
- Penawaran Lelang
Penawaran Lelang dimulai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas dan harga penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi.
- Pengembalian uang jaminan
 - Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pelaksanaan lelang melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang.
 - Ketentuan waktu pengembalian uang jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan pendaftaran nomor dan nama rekening oleh peserta lelang atau keterlambatan pengembalian karena mekanisme perbankan.
 - Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
- Pelunasan lelang
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 2% ditunjuk ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
- Obyek lelang dijual dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibelinya.
- Karena satu hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/penukaran lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan kantor pusat DJKN.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Small Remedial & Recovery (SMV) Yogyakarta, Telp. (0274) 541914 dan KPKNL Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No.11 Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 Maret 2022
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Wilayah 17

ttd
Pemimpin